

RENCANA AKSI TAHUN 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN KINERJA				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
			TB I	TB II	TB III	TB IV						TB I			TB II			TB III			TB IV			
												JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berkeadilan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks Stabilitas				78,05																		
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Presentase Rata- Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	25,47	50,40	74,43	90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Presentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dari segi waktu, kualitas, dan kuantitas	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100	Memuat jadwal penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10			√	√		√						√			
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Presentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjut				100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	3					√										
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD				73,14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2				√											
							<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100	Penguatan ketepatan peraturan penatausahaan keuangan, ketepatan waktu pembayaran	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11												√			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semestaran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestaran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestaran SKPD	11				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Promosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis promosi realisasi anggaran	11						√									
							<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu</i>	100	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat waktu dengan melakukan stock opname berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase SDM aparat yang meningkat kompetensinya</i>	100	Penyusunan, pemenuhan dan kelengkapan dokumen kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</i>	100	Penyediaan barang kebutuhan kantor di awal tahun dan penyusunan angkas dan kebutuhan per triwulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1						√									
							Penyediaan Barang Cetak dan Panoardaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1				√											
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	97					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Presentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100	Pengadaan barang dengan memperhatikan urgenti	Kasubag Umum dan Kepegawaian			√	√									
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16				√											
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1					√										
							<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Presentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan masyarakat</i>	100	Penyediaan barang kebutuhan kantor dan kebutuhan pemeliharaan BMD di awal tahun dan penyusunan angkas dan kebutuhan per triwulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	100			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	21				√								√			
							Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1						√									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN KINERJA				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
		TB I	TB II	TB III	TB IV						TB I			TB II			TB III			TB IV					
											JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10																	
2	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah Kota Pasuruan	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	5	10	15	20	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10	Penguatan, pembinaan serta sosialisasi tentang Ideologi Pancasila kepada masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, remaja/pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan karakter yang berpedoman kepada Ideologi Pancasila dan cinta tanah air.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional		√		√		√		√		√		√		
						Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3						√		√		√		√		√		√	
						pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1700								√		√		√		√		√	
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20		Pendidikan dan Pembinaan tentang Politik dan budaya politik di lingkungan masyarakat melalui Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat yang sadar politik, mengubah pola pikir, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serta meminimalkan konflik di tengah masyarakat.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri														
						Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemilu yang dibina	510																	
						Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1																	
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1																	
						pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1500																	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	2		Pembinaan dan pembentukan Organisasi masyarakat agar menjadi organisasi yang membawa agendanya ke arah yang lebih baik dan berdaya, memiliki keuasaan dan pengetahuan serta kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi dan mandiri.	Kepala Bidang Kemasayarakatan dan Ketahanan Bangsa		√		√		√		√		√		√		
						Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasayarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40																	
						pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	80																	
						pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	155																	
						pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Omras, Pemberdayaan Omras, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omras, Pengawasan Omras dan Omras Asing di Daerah	4																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN KINERJA				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
		TB I	TB II	TB III	TB IV						TB I			TB II			TB III			TB IV				
											JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah omas yang aktif	0,5	1	2	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20	Peningkatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan karakter yang produktif dan aktif menciptakan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan budaya yang ada.	Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Ketahanan Bangsa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1750				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1															√	
Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	5	10	15	20	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75	Peningkatan upaya-upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat serta fasilitas penanganan konflik. Upaya-upaya tersebut meliputi : 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. 2. Membangun persatuan dan kesatuan. 3. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. 4. Meredakan potensi konflik. Membangun sistem peringatan dini.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10718			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Kota Pasuruan

